

Catatan Budaya

Senjakala Kraton Kasunanan

Heri Priyatmoko MA

MENTARI hampir roboh di pojok parat. Sore itu, pandangan saya mampir pada barisan tentara dan polisi yang bergerombol di luar Kraton Kasunanan Surakarta. Armada militer berjejer di sekitar istana tua tersebut. Tampaknya ada peristiwa penting tengah terjadi. Ternyata, kisruh buah hati Paku Buwana XII belum tamat. Kekuatan kraton terbelah menjadi dua kubu yang bersitegang: kelompok PB XIII dan Lembaga Dewan Adat.

Kemelut dimulai sejak setelah mangkatnya PB XII hingga sekarang belum juga menemukan titik tengah. Aneka rupa strategi ditempuh, tapi tak juga berbuah manis. Alhasil, paras kraton makin keriput dan wibawanya dedel duel karena gagal menciptakan suasana tenteram bagi abdi dalem dan masyarakat. Pamornya pun ludes digero-goti oleh keluarga bangsawan sendiri. Tersebut sepenggal pertanyaan, mulai kapan pamor kakak tertua Kraton Kasultanan Jogja ini meredup?

Kaisar Jawa

Daun kalender menunjuk angka 20 Februari 1939. Masyarakat Kota Bengawan berkabung. Mereka kehilangan PB X yang dijuluki "Kaisar Jawa" itu. Apalagi tumbuh keyakinan bahwa geblak Sunan jatuh pada tanggal satu Sura, sebuah hari dari tahun baru Jawa yang dianggap keramat oleh wong Jawa. Sesaat setelah kematian Sinuwun, gong besar istana dan paling sakti bernama Kyai Surak berhenti berbunyi, dan dikandangkan selamanya. Fenomena ini menjadi tetenger (pertanda) tamatnya dinasti Paku Buwana atau runtuhnya puncak kejayaan Kraton Kasunanan.

Selepas Sunan mangkat, proses pergantian posisi raja mengalami kesulitan. Pangkal soalnya, PB X semasa berkuasa tiada pernah mengangkat putra mahkota sebagai pengganti secara resmi karena kedua ratu resmi tidak melahirkan seorang putra. Akhirnya muncul dua kubu mengeruhkan suasana, yaitu pendukung KGPH. Hangabehi untuk menggantikan PB X, dan penyokong KGPH.

Kusumayuda supaya naik takhta.

Dalam kondisi ruwet ini, pemerintah kolonial kembali memainkan peran demi keuntungan politik.

Merujuk keterangan George Larson (1990), pe-tinggi Belanda di Surakarta lewat Gubernur Orie mendorong Hangabehi maju menjadi PB XI. Tepatnya pada 26 April 1939, Hangabehi resmi dinobatkan duduk di kursi kekuasaan. Pengangkatan raja baru ini sepi dukungan dari kaum bangsawan. Publik juga menilainya kurang cakap. Di lain pihak, PB XI bernasib apes lantaran mewarisi kerajaan yang tak berpenghasilan sehingga sukar berkembang.

Penguasa Baru

Masyarakat Surakarta melakukan komparasi aspek kewibawaan atau kharisma yang melekat pada penguasa baru dengan raja sebelumnya. Mereka teringat ketidakepadanan antara PB X dengan penggantinya sebagai bukti bahwa telah terjadi perubahan besar dalam sifat pemerintahan tahun 1939. Sekeping fakta menarik, yaitu pengakuan seorang perempuan pensiunan guru yang dicatat antropolog John Pamberton (2003). Perempuan berusia enam puluhan di tahun 1980-an itu membandingkan dengan ketus: PB X merupakan raja sejati dan memang terlihat sebagai raja. Tetapi penggantinya (PB XI) tampaknya tak punya kekuatan sama sekali.

Meninggalnya PB X serta hadirnya PB IX yang bertakdir buruk itu, menebalkan perasaan bahwa di masa lampau, seorang Poros Semesta benar-benar ada, seorang raja sejati, dan saat ini tinggallah kenangan. Tersisa cuma seonggak istana yang mengalami kekosongan kosmik. Kekarnya dinding tembok kraton seakan berisi wibawa masa lalu, yang menyediakan kesempatan bagi khalayak di Surakarta untuk menyatakan identitas kejawaannya. Kehadiran PB IX (dan sesudah dia, PB XII) bagi penduduk Surakarta dirasa kurang cocok alias ganjil.

Demi membangkitkan kejayaan kerajaan serta menangkal perasaan ganjil warga, pihak istana menggelar lomba karawitan bagi aristokrat dan abdi dalem niyaga. Waridi (2006) mengungkap-

kan, kabar gembira ini diterima para niyaga keraton dan disambut penuh antusias. Martapangrawit membisiki sahabatnya, Mlayawidada: "wah sajake arep ana owah-owahan zamian, apa ya sing bakal kelakon mengko" (wah kelihatannya bakal terjadi perubahan zaman, apa ya yang akan terjadi nanti). Di balik rerasan kalangan niyaga, terba- ca suatu kecemasan akan kehidupan kraton pasca-PB X.

Kahanan istana makin terseok-seok tatkala PB XI mengalami kesulitan di sektor keuangan. Pemerintah Belanda mendadak mengurangi anggaran belanja kerajaan, karena terjadi perubahan status dari "vassal" (tanah kerajaan) melebur menjadi wilayah Hindia Belanda secara permanen. Pemangkasan budget dikerjakan secara bertahap dengan mempertimbangkan jumlah pejabat tingkat rendah bergaji sedikit bakal terkena imbas hematisasi.

Raja tidak sanggup berbuat banyak. Penyusutan pegawai kraton pun terjadi secara besar-besaran. Muaranya, melorotnya perasaan hormat, taat, kekaguman dan pengabdian abdi dalem kepada Sunan. Terbit suara nyinyir: "Ia bukan raja sejati! Hanya seperti Mangkunegara, tiap hari mengunjungi Gubernur! Pada masa Paku Buwana X, raja tidak pernah mengunjungi Gubernur; Gubernur yang selalu datang kepadanya dan harus minta izin dulu". Ditambah lagi, folklor Jawa yang mengatakan raja sesudah PB X, tidak berwibawa, kemuktian serta kemuliaan (Kuntowijoyo, 2004).

Dari tenunan kisah di muka, terpampang pengalaman sejarah berharga dan mestinya dipahami oleh putra-putri PB XII yang bersengketa bahwa kejayaan kekuasaan kraton tinggal cerita. Tugas mereka dewasa ini adalah memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap istana, bukan malah memberi contoh kurang terpuji dengan memamerkan konflik yang berkepanjangan. Kerugian yang tak ternilai ialah konflik akan merembet pada buruknya pengelolaan heritage dan tamatnya kraton sebagai sumber pengetahuan. Akhirnya, kita semua yang merugi. □ - g

*) Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Lahir di Solo